



BerAKHLAK # **bangga**
melayani
bangsa

Menaja





VISI

"Mewujudkan Pengadilan Tinggi Riau Yang Agung"

MISI

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Riau.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Riau.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Riau.

NILAI NILAI UTAMA

1. Kemandirian
2. Integritas
3. Kejujuran
4. Akuntabilitas
5. Responsibilitas
6. Keterbukaan
7. Ketidak berpihakan dan
8. Perlakuan yang sama di depan hukum

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2022



Prestasi Terbaik Membina Satker di Bawahnya Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran DIPA 03 TA 2021. (Penghargaan dari Dirjen Badilum)



Peringkat I Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). (Penghargaan dari Dirjen Badilum)



Harapan I atas Pemenang Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2022. (Penghargaan dari Dirjen Badilum)



Harapan II atas Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Terbaik Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Tahun 2022. (Penghargaan dari Dirjen Badilum)



Peringkat 1 kategori IKPA dengan pagu 10M - 100M. (Penghargaan dari KPPN Pekanbaru)



Peringkat 1 kategori Capaian Output Pagu 10M - 100 M. (Penghargaan dari KPPN Pekanbaru)

PRESTASI DAN PENGHARGAAN PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2022



Peringkat 1 kategori Penyerapan anggaran pagu 10M-100M. (Penghargaan dari KPPN Pekanbaru).



Peringkat 1 kategori pengelolaan UP/TUP terbaik tahun 2022. (Penghargaan dari KPPN Pekanbaru).



Peringkat 1 Kategori pengelolaan Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. (Penghargaan dari KPPN Pekanbaru).



Peringkat 1 Kategori Pengelolaan Belanja Kontraktual terbaik tahun 2022. (Penghargaan dari KPPN Pekanbaru).



PENGADILAN TINGGI RIAU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI RIAU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Riau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pekanbaru, 3 Februari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Muhammad Idroes, S.H, M.Hum.

Daftar Isi

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GRAFIK.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang.....	2
Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
Struktur Organisasi.....	2
Isu Strategis.....	4
Sistematika Penyajian.....	6

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024.....	8
Rencana Kinerja Tahun 2021.....	12
Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi.....	14
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	15
Realisasi Anggaran.....	29

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan.....	34
Rekomendasi.....	34

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2022	vi
Tabel 3. Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	4
Tabel 4. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	11
Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2022	12
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	12
Tabel 7. Capaian Kinerja Organisasi	14
Tabel 8. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Th. 2022.....	31
Tabel 9. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Th. 2018-2022.....	16
Tabel 10. Jumlah Perkara Pidana ang Putus Tepat Waktu Tahun 2022	17
Tabel 11. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu Th. 2018-2022	18
Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana Khusus Yang Putus Tepat Waktu Tahun 2022	18
Tabel 13. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu Th. 2018-2022	19
Tabel 14. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022	20
Tabel 15. Persentasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2018-2022.....	21
Tabel 16. Capaian Indeks Responden Pengadilan Tk. Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Perdilan Tk Banding.....	22
Tabel 17. Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2022	22
Tabel 18. Persentase Salinan Keputusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th 2018-2022.....	25
Tabel 19. Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengajuan Tepat Waktu Tahun 2022	26
Tabel 20. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Penngaju Tepat Waktu Th. 2018-2022.....	27
Tabel 21. Jumlah Salinan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2022	28
Tabel 22. Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang dikirim Kepengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2018-2022.....	28
Tabel 23. Realisasi Anggaran Tahun 2018-2022.....	29
Tabel 24. Realisasi DIPA 01	29
Tabel 25. Realisasi DIPA 03.....	30
Tabel 26. Realisasi DIPA 01 yang Mendukung Sasaran Strategis 1 dan 7 Indikator.....	30
Tabel 27. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator Sasaran 1	31
Tabel 28. Biaya Proses Tahun 2022 yang Mendukung Sasaran Strategis 2	31
Tabel 29. Realisasi DIPA 03 yang Mendukung Sasaran Strategis 2.....	31
Tabel 30. Realisasi DIPA 01 Dan DIPA 03 yang Mendukung Sasaran strategis 1 dan sasaran strategis	32

Daftar Grafik

Grafik 1. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Th. 2018 s.d 2022	16
Grafik 2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Th. 2018 s.d 2022.....	17
Grafik 3. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tepat Waktu Th. 2018 s.d 2022	19
Grafik 4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2018 -2022	20
Grafik 5. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2018 - 2022.....	25
Grafik 6. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2018 - 2022.....	27
Grafik 7. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	28
Grafik 8. Realisasi Anggaran Tahun 2018 - 2022	29

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau	3
Gambar 2. Framework	10
Gambar 3. Capaian Sasaran1- Indikator 1 pada Evakip	16
Gambar 4. Capaian Sasaran 1-Indikator 2 pada Evakip	17
Gambar 5. Capaian Sasaran 1-Indikator 3 pada Evakip	18
Gambar 6. Capaian Sasaran 1-Indikator 4 pada Evakip	20
Gambar 7. Hasil SKM di aplikasi Sisuper.....	23
Gambar 8. Capaian Sasaran 2-Indikator 1 pada Evakip	24
Gambar 12. Capaian Sasaran 2-Indikator 2 pada Evakip	26
Gambar 13. Capaian Sasaran 2- Indikator 3 pada Evakip	27



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020 - 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Tahun 2022 ini berisi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta komitmen Pengadilan Tinggi Riau dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan tersebut menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran. Kinerja Pengadilan Tinggi Riau diukur atas dasar penilaian indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Secara umum capaian kinerja tahun 2022 telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan, meskipun masih ada indikator yang belum mencapai target, namun beberapa indikator dapat melebihi target. Keberhasilan pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap warga Pengadilan Tinggi Riau beserta seluruh jajaran Pengadilan Negeri di bawahnya, masyarakat, dan *stakeholder* yang terlibat. Capaian kinerja ini diharapkan akan berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta terwujudnya aparatur Pengadilan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi.

Akhir kata, saya selaku pimpinan mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh pihak. Semoga Laporan Kinerja yang telah disusun ini bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik untuk mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Riau.

Pekanbaru, 3 Februari 2023

H. Mohammad Idroes, SH, M.Hum.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2022 dinyatakan “Berhasil”, karena pada dua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu : sebesar 101%.

Untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” capaian sebesar 103% dan untuk Sasaran Strategis

“Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, capainannya sebesar 101%.

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Riau secara keseluruhan pada tahun 2022 menunjukkan kinerja yang positif, hal ini dibuktikan dengan Pengadilan Tinggi Riau mampu mempertahankan rata-rata capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 101%.

Tabel 1. Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		2	Persentase perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		3	Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		4	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%	38,37%	104%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	95,28%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I						103%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II						100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II						101%



BAB I PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- STRUKTUR ORGANISASI
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PENYAJIAN

LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Riau berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 dan diresmikan pada tanggal 21 Juli 1983. Awalnya wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau meliputi 15 (lima belas) Pengadilan Negeri di wilayah provinsi Riau dan provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan setelah diresmikannya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 5 Desember 2022, maka 4 (empat) Pengadilan Negeri di Kepulauan Riau menjadi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau menjadi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di Provinsi Riau, yaitu :

1. Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA
2. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
3. Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB
4. Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas IB
5. Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB
6. Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB
7. Pengadilan Negeri Rengat Kelas II
8. Pengadilan Negeri Tembilahan Kelas II
9. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kelas II
10. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Kelas II
11. Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Kelas II

Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Tinggi Riau secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat banding.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Tinggi dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban Pengadilan Tinggi Riau atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan Tinggi Riau. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

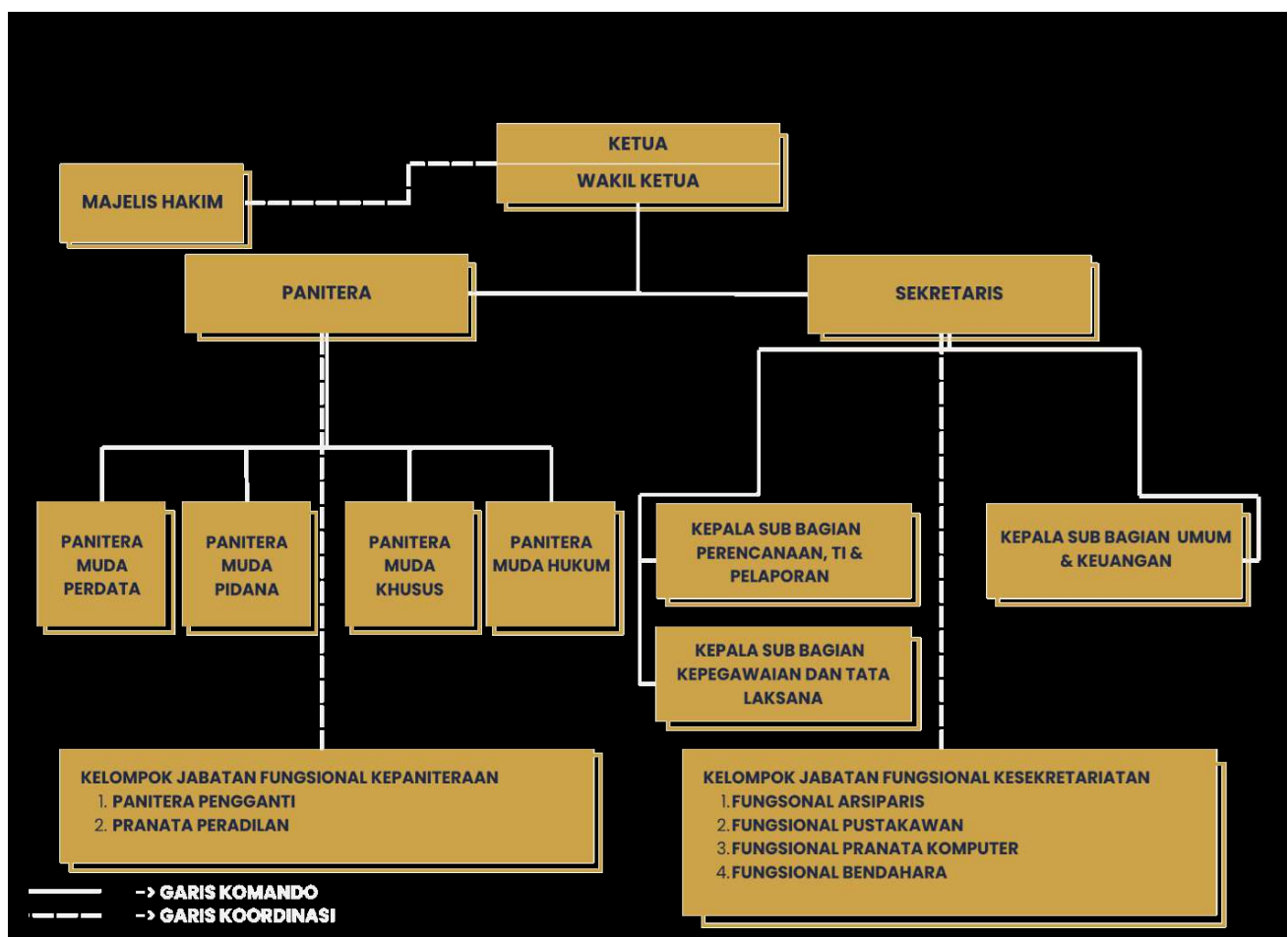
Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Riau diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Riau mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Riau



Tabel 3. Uraian Tugas Struktur Organisasi

URAIAN TUGAS		
KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan. WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya. HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya		
PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.	
PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata		
PANMUD TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti	SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyediaan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.	SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam menyiapkan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.	SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyediaan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.	SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam menyiapkan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.		

ISU STRATEGIS

Pengadilan Tinggi Riau sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 11 (sebelas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum provinsi Riau memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Tinggi Riau secara lokasi maupun hirarki adalah institusi terdekat dengan pengadilan-pengadilan tingkat pertama di wilayah propinsi Riau.

Peran strategis Pengadilan Tinggi Riau sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2022, Pengadilan Tinggi Riau telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Riau tahun 2022 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui langkah Reformasi Birokrasi yang bermuara kepada usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan Aparat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi di dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien. Pengadilan Tinggi Riau telah melakukan pencanangannya pada tanggal 10 November 2017. Tahun 2022 adalah tahun kelima bagi Pengadilan Tinggi Riau untuk berusaha memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

2. Membangun inovasi yang mendukung peningkatan Pelayanan publik yaitu: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online Adalah inovasi Layanan Pengadilan Tinggi Riau yang telah terintegrasi dengan seluruh jenis layanan yang ada pada PTSP. PTSP Online Pengadilan Tinggi Riau dapat di akses melalui alamat <https://ptsponline.pt-pekabaru.go.id> dan memuat 11 (sebelas) jenis layanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat yaitu :
 - a. Info Perkara Banding
 - b. Layanan Penahanan
 - c. Penyempahan Advokat
 - d. Izin Riset & Kerja Praktik
 - e. Informasi Layanan
 - f. Pengaduan
 - g. Survey Kepuasan Masyarakat & IPK
 - h. Data Statistik
 - i. Live Chat PTSP
 - j. Live Streaming PTSP
 - k. Layanan Data Perkara
3. Membangun inovasi yang mendukung peningkatan Pelayanan publik yaitu: Evakip, adalah aplikasi yang memberikan informasi capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau secara berkala (bulanan, triwulan, tahunan) yang digunakan sebagai media monitoring dan evaluasi capaian kinerja. Aplikasi ini terintegrasi dengan aplikasi lainnya yang menjadi sumber data seperti SIPP dan Sisuper, sehingga perhitungan capaian kinerja menjadi akurat. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat <https://evakip.pt-pekabaru.go.id>.
4. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi

dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pengadilan Tinggi Riau beberapa kali mendapatkan penghargaan dari Dirjen Badan Peradilan Umum dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Riau mendapatkan juara Harapan I.

5. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (*Indonesian Court Performance Excellent*). Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Riau dan seluruh satker di wilayah hukumnya telah diakreditasi. Selanjutnya pada tahun 2022 kegiatan akreditasi ini berkelanjutan, dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah dievaluasi secara berkala setiap tahun. Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Riau tetap dapat mempertahankan nilai akreditasi predikat "A" seperti tahun sebelumnya.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN

- **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024**
- **RENCANA KINERJA TAHUN 2022**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

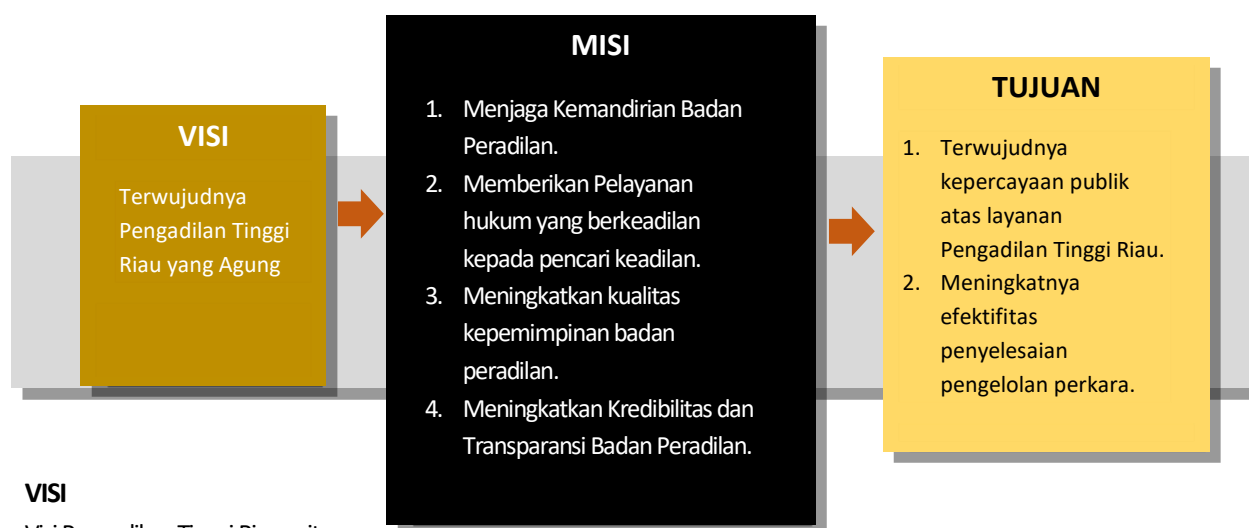
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau melalui perencanaan yang efektif, terarah, dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (result oriented) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Riau menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung

RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 173/SEK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.



VISI

Visi Pengadilan Tinggi Riau yaitu :

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Riau yang Agung"

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Riau untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Riau sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan Tinggi Riau, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan

TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Riau, sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Riau.
Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :
 - a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
 - b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.
 - c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan

2. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini adalah :

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam waktu 1 hari setelah putus.

SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Riau menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
- Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Tinggi Riau menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program: Dukungan manajemen

Program dukungan manajemen terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

b. Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

3. Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum

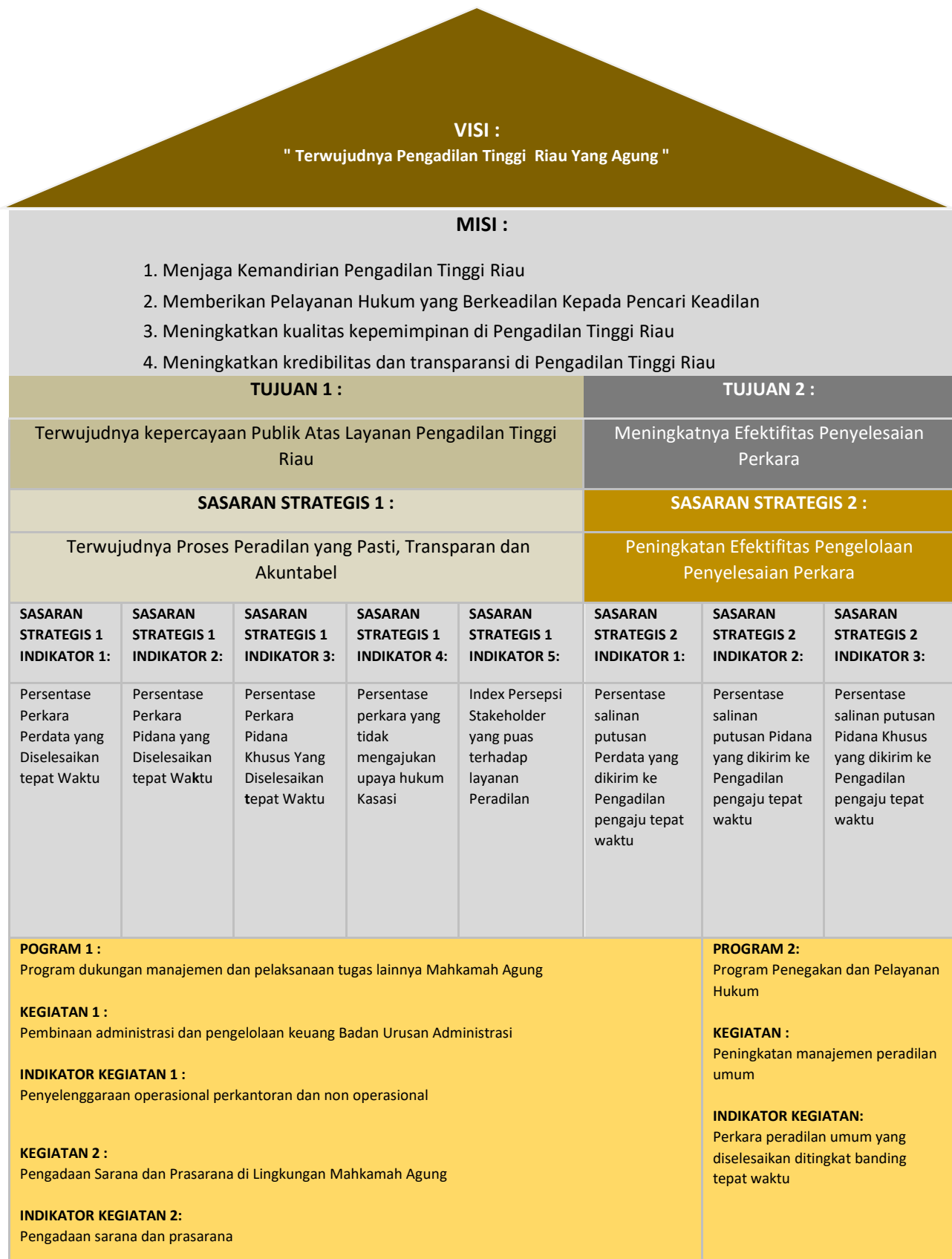
Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum.

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat banding secara tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.

Gambar 2. Framework
Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Riau



Tabel 4. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

NO	TUJUAN		SASARAN					STRATEGIS						
	URAIAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.
		JANGKA MENENGAH			2020	2021	2022	2023	2024					
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	93%	Meningkatnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 Layanan	120.000.000.000
		93%		2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%					
		97%		2. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	100%	100%	100%					
		44%		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	51%	52%	37%	40%	40%					
				4. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi										
		93%			87%	88%	95%	96%	97%		Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan Prasarana	5 Layanan	2.000.000.000
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat banding tepat waktu	1.500 perkara	1.800.000.000
		100%		2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		100%		3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					

RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Riau memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		2 Persentase perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		3 Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja peta strategi, sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		2 Persentase perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		3 Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	24.058.567.000
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	453.500.000
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	428.790.000

SIDANG PLENO LAPORAN TAHUNAN 2022 PENGADILAN TINGGI RIAU

AKSELERASI PERWUJUDAN PERADILAN
MODERN YANG BERKEADILAN

PEKANBARU, 6 FEBRUARI 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**
- **EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN**
- **KINERJA REALISASI ANGGARAN**

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Riau merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2022. Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja .

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2022 dinyatakan “Berhasil”, karena pada dua sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100%, yaitu : sebesar 101%. Capaian untuk Sasaran Strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,

Transparan dan Akuntabel” dan sebesar 103%, dan untuk Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara” sebesar 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah berhasil mencapai target untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Tabel 7. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		2 Persentase perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		3 Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%	38,37%	104%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	95,28%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I					103%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II					100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II					101%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

**Sasaran 1****Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Riau, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 5 indikator yang diukur pada sasaran ini, 5 indikator memperoleh capaian $\geq 100\%$, dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	105%
2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	105%
3. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	104%
5. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	100%

Sasaran 1 - Indikator kinerja 1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu

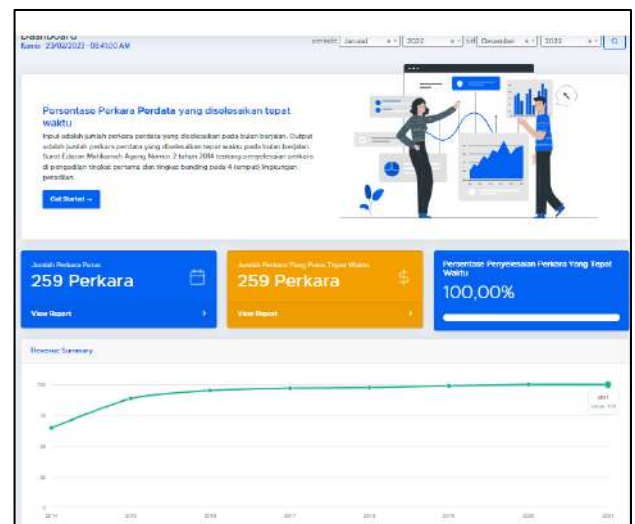
Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Pada tahun 2022 realisasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%, karena jumlah perkara perdata yang putus sebanyak 259 perkara seluruhnya diselesaikan tepat waktu tidak melebihi 3 bulan. Perhitungan realisasi ini dilakukan secara sistematis melalui aplikasi Evakip.

Realisasi indikator ini sangat baik dan mencapai melebihi target 95% sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 105%.

Gambar 3. Capaian Sasaran 1-Indikator 1 pada Evakip



Tabel 8. Persentase Penyelesaian Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2022

Bulan	Perkara Perdata yang Putus Th. 2022	Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu Th. 2022	Realisasi Persentase Perkara Perdata yang Putus Tepat Waktu
Januari	13	13	100%
Februari	28	28	100%
Maret	22	22	100%
April	24	24	100%
Mei	17	17	100%
Juni	22	22	100%
Juli	21	21	100%
Agustus	24	24	100%
September	22	22	100%
Oktober	13	13	100%
November	22	22	100%
Desember	31	31	100%
Jumlah	259	259	100%

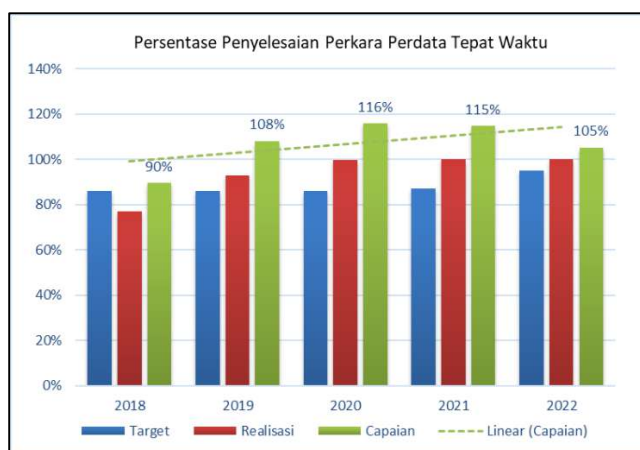
Realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 100% yang nilai realisasinya sama dengan tahun sebelumnya. Capaian pada tahun 2022 sebesar 105% lebih rendah dari capaian tahun 2021 sebesar 115%, karena target yang ditetapkan pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

Tabel dan grafik berikut ini menunjukkan perbandingan realisasi dan capaian penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sesuai data di tabel, setiap tahunnya realisasi kinerja penyelesaian perkara perdata yang tepat waktu selalu mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Pengadilan Tinggi Riau selalu berupaya memberikan kinerja yang maksimal dalam penyelesaian perkara.

Keberhasilan penyelesaian perkara perdata tepat waktu mencapai 100% menunjukkan salah satu keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses

peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Riau.

Grafik 1. Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu Th. 2018 s.d 2022



Tabel 9. Persentase Penyelesaian Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 s.d 2022

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tahun 2022	Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2022	259	259	95	100	105%
	2021	256	256	87%	100%	115%
	2020	274	273	86%	99,6%	116%
	2019	318	296	86%	93%	109%
	2018	335	258	86%	77%	91%

Sasaran 1 - Indikator kinerja 2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara pidana yang

diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Pada tahun 2022 indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 105%. Capaian indikator ini sangat baik karena

dapat melebihi target. Realisasi penyelesaian penyelesaian perkara pidana tepat waktu adalah 100%, karena dari 753 Perkara yang telah diselesaikan (baik perkara pidana biasa maupun pidana anak), keseluruhan perkara tersebut dapat

diselesaikan tepat waktu waktu dalam kurun waktu tidak melebihi 3 (tiga bulan) sesuai Surat Edaran ketua Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014.

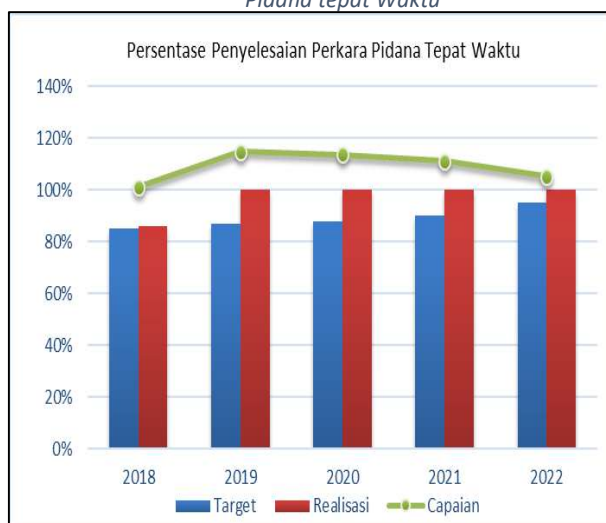
Tabel 10. Jumlah Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu Tahun 2022

Bulan	Perkara Pidana Yang Putus Pada Tahun 2022	Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu	Realisasi Perkara Pidana Yang Putus Tepat Waktu (%)
Januari	40	40	100%
Februari	66	66	100%
Maret	57	57	100%
April	78	78	100%
Mei	58	58	100%
Juni	66	66	100%
Juli	59	59	100%
Agustus	46	46	100%
September	65	65	100%
Oktober	76	76	100%
November	57	57	100%
Desember	67	67	100%
Jumlah	753	753	100%

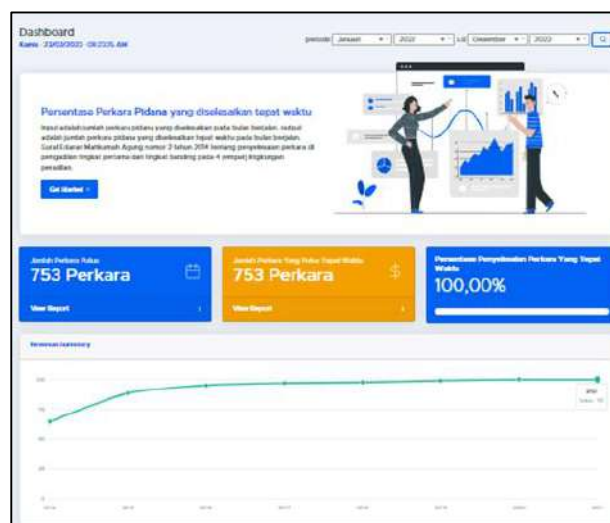
Berdasarkan data pada Tabel dan Grafik Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Tepat Waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, capaian indikator ini sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 berturut turut adalah 101%, 115%, 114%, 111% dan 105%. Penurunan capaian pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar 6%. Penurunan capaian dikarenakan adanya peningkatan target dari tahun sebelumnya.

Namun Pengadilan Tinggi Riau tetap konsisten dalam peningkatan kinerja, sehingga hampir setiap tahun mampu merealisasikan perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100%. Keberhasilan penyelesaian perkara pidana tepat waktu mencapai 100% menunjukkan salah satu keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Riau.

Grafik 2. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana tepat Waktu



Gambar 4. Capaian Sasaran 1-Indikator 2 pada Evakip



Tabel 11. Persentase Penyelesaian Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 s.d 2022

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Pidana Diselesaikan Tahun 2022	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2022	753	753	95%	100%	105%
	2021	717	717	90%	100%	111%
	2020	676	676	88%	100%	114%
	2019	600	600	87%	100%	115%
	2018	519	447	85%	86%	101%

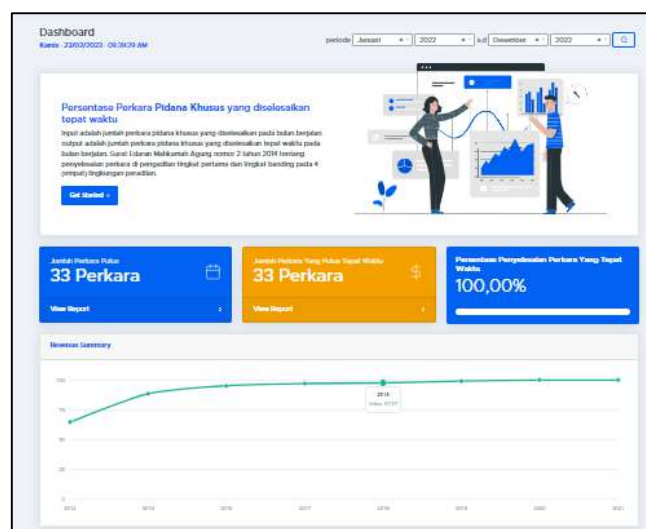
Sasaran 1 - Indikator kinerja 3. Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Perkara pidana khusus yang ditanganani di Pengadilan Tinggi Riau adalah pidana Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), yang waktu penyelesaiannya adalah maksimal 60 hari sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pada tahun 2022 indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu memperoleh capaian sebesar 100%. Dari jumlah 33 Perkara Pidana khusus tersebut, keseluruhannya Perkara Pidana Khusus dapat diselesaikan tidak melebihi waktu 60 hari, sehingga realisasinya mencapai 100%.

Perhitungan realisasi ini dilakukan secara sistematis melalui aplikasi Evakip.

Gambar 5. Capaian Sasaran 1-Indikator 3 pada Evakip



Tabel 12. Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu Tahun 2021

Bulan	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Putus Pada Tahun 2022	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu	Realisasi Perkara Pidana Khusus yang Putus Tepat Waktu (%)
Januari	-	-	-
Februari	4	4	100%
Maret	1	1	100%
April	2	2	100%
Mei	1	1	100%
Juni	4	4	100%
Juli	3	3	100%
Agustus	4	4	100%
September	3	3	100%
Oktober	4	4	100%
November	1	1	100%
Desember	6	6	100%
Jumlah	33	33	100%

Capaian persentase penyelesaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2022 berturut-turut adalah 118%, 80%, 110%, 109% dan 100%. Pada Tahun 2022, capaian perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu menurun dibandingkan tahun 2021 karena adanya kenaikan target pada tahun 2022, namun pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Riau tetap mampu mempertahankan realisasi penyelesaian perkara pidana khusus tepat waktu sebesar 100%. Keberhasilan penyelesaian perkara pidana khusus tepat waktu mencapai 100% menunjukkan salah satu keberhasilan tercapainya sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tinggi Riau.

Grafik 3. Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Khusus tepat Waktu Tahun 2018 s.d 2022



Tabel 13. Persentase Penyelesaian Perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2018 s.d 2022

Indikator Kinerja	Tahun	Perkara Pidana Diselesaikan Tahun 2022	Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	2022	33	33	100	100%	100%
	2021	38	38	92%	100%	109%
	2020	24	24	91%	100%	110%
	2019	25	18	90%	72%	80%
	2018	11	11	85%	100%	118%

Adapun faktor yang mendukung tercapainya kinerja penyelesaian perkara tepat waktu, baik perdata, pidana, maupun pidana khusus adalah:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan maksimal 60 (enam) puluh hari untuk perkara pidana khusus yaitu Tindak Pidana Korupsi sesuai diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan kebijakan tersebut, maka otomatis Hakim dan Panitera bertanggung jawab untuk menyelesaikan perkara dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu maksimal hanya 3 bulan.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring Evakip, rapat koordinasi, Whatsapp Group, teleconference.
3. Adanya reward dan punishment terhadap penyelesaian sisa perkara yang tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

4. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim, Panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan.

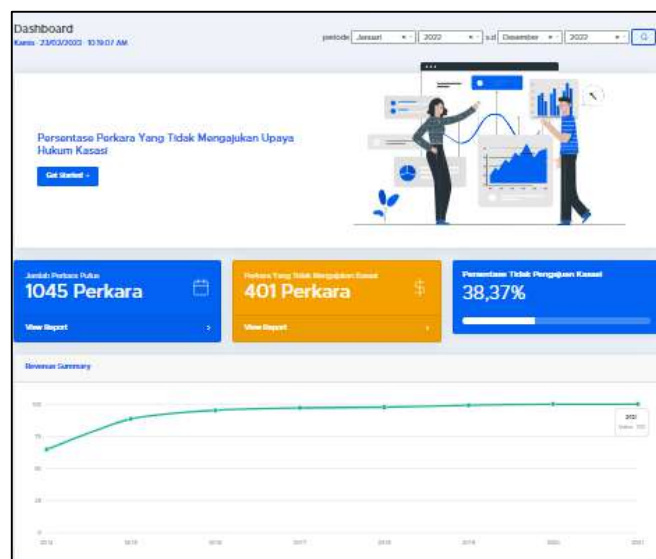
Pencapaian kinerja penyelesaian perkara Perdata, Pidana, maupun Pidana Khusus tepat waktu pada tahun 2022, seluruhnya mencapai realisasi 100%. Capaian ini didukung faktor adanya tanggung jawab melaksanakan kebijakan, monitoring dan evaluasi secara berkala, adanya reward dan punishment dalam penyelesaian perkara, serta karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara majelis Hakim, Panitera pengganti, dan bagian kepaniteraan.

Kondisi ini menunjukkan tercapainya sasaran strategis yang diharapkan yaitu: "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel di Pengadilan Tinggi Riau".

Sasaran 1 - Indikator kinerja 4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah perkara perkara yang diputus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Secara umum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat banding. Pada tahun 2022, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah sebesar 38,4%, karena dari 1.045 perkara yang diputus di tingkat banding, sebanyak 401 perkara tidak mengajukan kasasi. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Evakip. Realisasi ini melebihi yang ditargetkan 37% sehingga sehingga capaian indikator ini hanya sebesar 104%.

Gambar 6. Capaian Sasaran 1-Indikator 4 pada Evakip

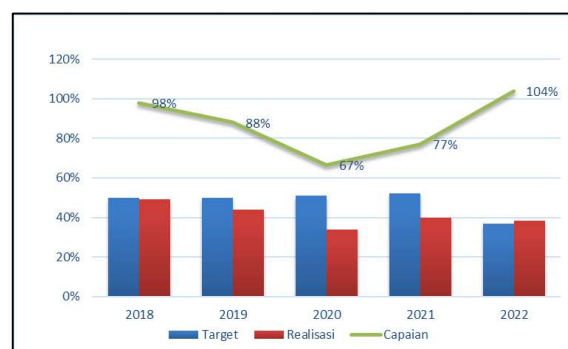


Tabel 14. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Realisasi Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (%)
1	Januari	53	37	16	30%
2	Februari	98	67	31	32%
3	Maret	80	47	33	41%
4	April	104	66	38	37%
5	Mei	76	44	32	42%
6	Juni	92	52	40	43%
7	Juli	101	60	41	41%
8	Agustus	74	49	25	34%
9	September	90	55	35	39%
10	Oktober	93	55	38	41%
11	November	80	45	35	44%
12	Desember	104	67	37	36%
Jumlah		1045	644	401	38,4%

Pada gambar grafik disamping, dijelaskan capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi berturut turut dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 98%, 88%, 67%, 76% dan 104%. Kondisi ini menunjukkan capaian kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 4. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Th. 2018 -2022



Tabel 15. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi Tahun 2018 s.d 2022

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus Tingkat Banding Tahun 2022	Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	2022	1045	644	401	37%	38%	104%
	2021	1012	614	397	52%	39%	76%
	2020	974	640	334	51%	34%	67%
	2019	943	531	412	50%	44%	88%
	2018	716	364	352	50%	49%	98%

Bahwa indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2022 telah mencapai target, namun realisasi jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi dibandingkan dengan perkara yang putus pada tahun 2022 sebesar 38% lebih rendah dibanding tahun 2021 sebesar 39%.

Faktor yang menyebabkan meningkatnya upaya hukum kasasi sulit untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi. Salah satunya yang melatarbelakangi juga disebabkan karena Jaksa tidak puas dengan vonis putusan pengadilan yaitu putusan pidana yang dijatuhkan jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya. Hal ini mengharuskan Jaksa mengajukan upaya hukum kasasi, sedangkan

berapapun banyak jumlah kasasi dalam perkara pidana yang dimohonkan jaksa atau terdakwa tidak bisa dibatasi oleh pengadilan karena dalam UU Kekuasaan Kehakiman, pengadilan juga tidak boleh menolak perkara.

Terlepas dari faktor tersebut, peningkatan capaian kinerja terhadap perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2022 tetap menjadi acuan untuk penilain kinerja di Pengadilan Tinggi Riau.

Peningkatan capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 104% menunjukkan bahwa terwujudnya peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Riau pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan tercapainya sasaran strategis yang diharapkan yaitu: "Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel di Pengadilan Tinggi Riau".

Sasaran 1 - Indikator kinerja 8. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah perbandingan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding dengan jumlah responden Peradilan Tingkat Pertama. Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun 2022 memperoleh realisasi sebesar 95,28%. Capaian realisasi tersebut terhadap target adalah sebesar 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Capaian indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi pada Th. 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 16. Capaian indeks responden pengadilan tk. pertama yang puas terhadap layanan peradilan tk. banding Tahun 2018 s.d 2022

TAHUN	NO	RUANG LINGKUP	SKOR INTERPRESTASI	KATEGORI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2018	1	Persyaratan	78,3	Sangat baik	78,3	85	92,1%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	79,1	Sangat baik	79,1	85	93,1%
	3	Waktu Penyelesaian	75,4	Sangat baik	75,4	85	88,7%
	4	Biaya/Tarif	80,2	Sangat Baik	80,2	85	94,4%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	77,6	Sangat baik	77,6	85	91,3%
	6	Kompetensi Pelaksana	79,4	Sangat baik	79,4	85	93,4%
	7	Perilaku Pelaksana	86,4	Sangat baik	86,4	85	101,6%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	94,5	Sangat baik	94,5	85	111,2%
	9	Sarana dan Prasarana	86	Sangat baik	86,0	85	101,2%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2018 :				81,9	85	96,3%
TAHUN	NO	RUANG LINGKUP	SKOR INTERPRESTASI	KATEGORI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2019	1	Persyaratan	95,5	Sangat baik	95,5	86	111,0%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	90,3	Sangat baik	90,3	86	105,0%
	3	Waktu Penyelesaian	76,8	Sangat baik	76,8	86	89,3%
	4	Biaya/Tarif	79,5	Sangat Baik	79,5	86	92,4%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,5	Sangat baik	92,5	86	107,6%
	6	Kompetensi Pelaksana	93,3	Sangat baik	93,3	86	108,5%
	7	Perilaku Pelaksana	92,5	Sangat baik	92,5	86	107,6%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	77,8	Sangat baik	77,8	86	90,5%
	9	Sarana dan Prasarana	92,5	Sangat baik	92,5	86	107,6%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2019 :				87,8	86	102,1%
TAHUN	NO	RUANG LINGKUP	SKOR INTERPRESTASI	KATEGORI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2020	1	Persyaratan	94,0	Sangat baik	94,0	87	108,0%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	93,5	Sangat baik	93,5	87	107,5%
	3	Waktu Penyelesaian	85,8	Sangat baik	85,8	87	98,6%
	4	Biaya/Tarif	88,0	Sangat Baik	88,0	87	101,1%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,5	Sangat baik	90,5	87	104,0%
	6	Kompetensi Pelaksana	88,0	Sangat baik	88,0	87	101,1%
	7	Perilaku Pelaksana	88,8	Sangat baik	88,8	87	102,0%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	97,5	Sangat baik	97,5	87	112,1%
	9	Sarana dan Prasarana	87,0	Sangat baik	87,0	87	100,0%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2020 :				90,33	87	104%
TAHUN	NO	RUANG LINGKUP	SKOR INTERPRESTASI	KATEGORI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2021	1	Persyaratan	98,8	Sangat baik	98,8	88	112,3%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	3	Waktu Penyelesaian	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	4	Biaya/Tarif	100,0	Sangat Baik	100,0	88	113,6%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	6	Kompetensi Pelaksana	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	7	Perilaku Pelaksana	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	100,0	Sangat baik	100,0	88a	113,6%

	9	Sarana dan Prasarana	100,0	Sangat baik	100,0	88	113,6%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2021 :				99,87	88	113%
TAHUN	NO	RUANG LINGKUP	SKOR INTERPRESTASI	KATEGORI	*REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Th. 2022	1	Persyaratan	94,77	Sangat baik	94,77	95	99,76%
	2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	95,92	Sangat baik	95,92	95	100%
	3	Waktu Penyelesaian	93,6	Sangat baik	93,6	95	98,52%
	4	Biaya/Tarif	96,5	Sangat Baik	96,5	95	98,44%
	5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	95,92	Sangat baik	95,92	95	99,04%
	6	Kompetensi Pelaksana	94,17	Sangat baik	94,17	95	99,12%
	7	Perilaku Pelaksana	92,45	Sangat baik	92,45	95	97,31%
	8	Penanganan pengaduan, saran, masukan	93,35	Sangat baik	93,35	95	98,26%
	9	Sarana dan Prasarana	98,82	Sangat baik	98,82	95	104,02%
	Realisasi, Target, dan Capaian Th. 2022 :				95,28	95	100%

Gambar 7. Hasil SKM di aplikasi SKM online

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2022 terdiri dari 9 komponen, yaitu Persyaratan; Prosedur; Waktu pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan; Sarana dan Prasarana. Tabel diatas, menunjukkan data peningkatan capaian kinerja indeks responden peradiln tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding setiap tahunnya.

Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, yaitu SISUPER.

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan, melalui Briefing, Bimtek, *Training Service Excellent*, Pelatihan Pelayanan Disabilitas,
2. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
3. Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi PTSP Online.
4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar pelayanan dan SOP.
5. Monev pelayanan PTSP yang dilaksanakan secara berkala dan ditindaklanjuti



Capaian kinerja indeks responden peradiln tingkat pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding yang selalu meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau konsisten dalam meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada pengguna layanan, salah satunya kepada Peradilan Tingkat I sebagai pengguna layanan .

Peningkatan kinerja tersebut menunjukkan tercapainya sasaran strategis yang diharapkan yaitu : “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Tinggi Riau”.



Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. K sasaran strategis ini berhasil memperoleh capaian 94% , capaian indikator tersebut antara lain :

- | | |
|--|------|
| 1. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu | 100% |
| 2. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu | 100% |
| 3. Persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu | 100% |

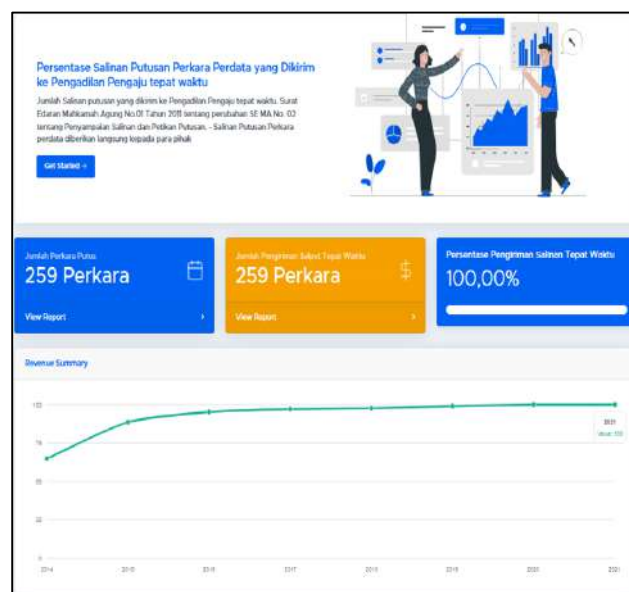
Sasaran 2 - Indikator kinerja 1. Persentase Salinan Putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara perdata. Input adalah jumlah Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju, sedangkan outputnya adalah jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. Pada tahun 2022 indikator ini mencapai target 100%, karena hampir seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

Pengiriman salinan putusan ke pengadilan Pengaju mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pada tahun 2022, jumlah putusan perkara perdata sebanyak 259 perkara dan sebanyak 259 putusan perkara perdata dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Evakip. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Riau mengirim Salinan putusan ke Pengadilan pengaju melalui email atau melalui ekspedisi setelah perkara diputus, dan tanggal pengiriman salinan putusan diinputkan ke SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Riau untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektivitas Pengadilan Tinggi Riau dalam pengiriman putusan perkara. Berikut tabel rincian pengiriman salinan putusan perkara perdata ke pengadilan pengaju tepat waktu selama tahun 2022.

Gambar 8. Capaian Sasaran 2-Indikator 1 pada Evakip

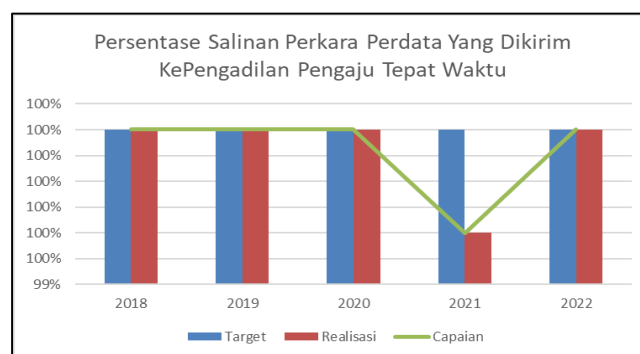


Tabel 17. Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

No.	Bulan	Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Jumlah Salinan Perkara yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
1	Januari	13	13	0	100%
2	Februari	28	28	0	100%
3	Maret	22	22	0	100%
4	April	24	24	0	100%
5	Mei	17	17	0	100%
6	Juni	22	22	0	100%
7	Juli	21	21	0	100%
8	Agustus	24	24	0	100%
9	September	22	22	0	100%
10	Oktober	13	13	0	100%
11	November	22	22	0	100%
12	Desember	31	31	0	100%
Jumlah		259	259	0	100%

Kondisi pengiriman salinan putusan Pidana ke Pengadilan tepat waktu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Berturut – turut capaian kinerja persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 100%, 100%, 100%, 99,% dan 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 5. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2018 - 2022



Tabel 18. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara Perdata	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Ke pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Dikirim Ke pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2022	259	259	100%	100,0%	100,0%
	2021	256	255	100%	99,6%	99,6%
	2020	274	274	100%	100%	100%
	2018	244	244	100%	100%	100%
	2019	258	258	100%	100%	100%

Sasaran 2 - Indikator 2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

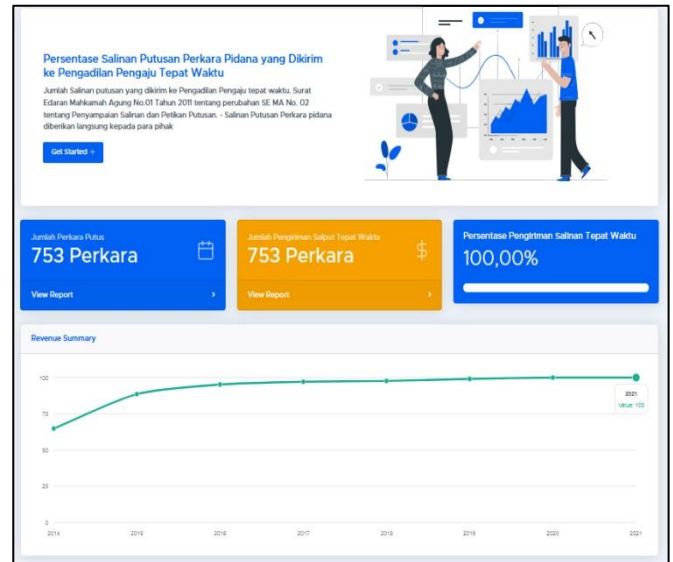
Indikator kinerja “Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana.

Pada tahun 2022 capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai 100%. Pada tahun 2022, jumlah putusan perkara pidana (Pidana Biasa dan Pidana Anak) sebanyak 753 perkara, sebanyak 753 salinan putusan perkara pidana dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Evakip.

Seperti perkara Perdata, pengiriman salinan putusan perkara Pidana ke Pengadilan Pengaju mengacu pada Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara dan Surat Edaran No. 1 Tahun Tahun 2011 tentang Penyampaian dan Salinan Putusan, yaitu 14 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Pengukuran indikator ini juga dilakukan dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui ekspedisi atau melalui email yang dicatat di SIPP. Pengukuran ini juga dapat dicek melalui data yang diinput pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Mahkamah Agung, yaitu tanggal minutasasi dan tanggal pengiriman berkas yang waktunya tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Berikut rincian jumlah salinan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu.

Gambar 9. Capaian Sasaran 2-Indikator 2 pada Evakip

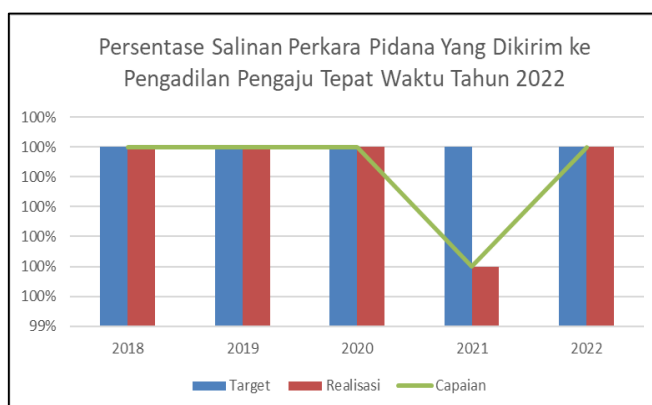


Tabel 19. Jumlah Salinan Perkara Pidana yang Dikirim Kepengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Salinan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju Tepat Waktu	Jumlah Salinan Perkara Pidana Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
1	Januari	40	40	0	100%
2	Februari	66	66	0	100%
3	Maret	57	57	0	100%
4	April	78	78	0	100%
5	Mei	58	58	0	100%
6	Juni	66	66	0	100%
7	Juli	77	77	0	100%
8	Agustus	46	46	0	100%
9	September	65	65	0	100%
10	Oktober	76	76	0	100%
11	November	57	57	0	100%
12	Desember	67	67	0	100%
Jumlah		753	753	0	100%

Kondisi pengiriman salinan putusan perkara Pidana ke Pengadilan tepat waktu telah dilakukan pada seperti tahun-tahun sebelumnya. Berturut – turut capaian kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 100%, 100%, 100%, 99,6% dan 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 6. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2018 - 2022



Tabel 20. Persentase Salinan Putusan Pidana yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2018 -2022

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirim Kependadilan Pengaju Tepat Waktu			Target	Realisasi	Capaian
		Jumlah Putusan Perkara Perdata	Jumlah Putusan Perkara Pidana	Jumlah Putusan Perkara Perdata dan Pidana			
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2022	753	753	1506	100%	100,0%	100,0%
	2021	717	714	1431	100%	99,6%	99,6%
	2020	676	676	1352	100%	100,0%	100%
	2018	600	600	1200	100%	100,0%	100%
	2019	447	447	894	100%	100,0%	100%

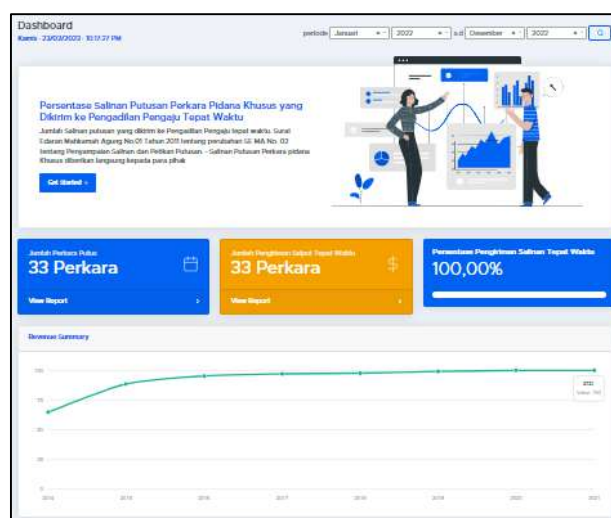
Sasaran 2 - Indikator 3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah putusan perkara pidana khusus. Pada Tahun 2022 Capaian indikator persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai 100%. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Evakip.

Pada tahun 2022, jumlah putusan perkara pidana Khusus sebanyak 33 perkara, sebanyak 33 salinan putusan perkara pidana dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Seperti perkara perdata, pengiriman petikan putusan perkara pidana khusus ke pengadilan pengaju juga dilakukan melalui email atau melalui ekspedisi setelah perkara diputus, dan salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju paling lama 14 (empat belas) hari.

Pengukuran indikator ini juga dilakukan dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui ekspedisi, Pengukuran ini juga dapat dicek melalui data yang diinput pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Mahkamah Agung, yaitu tanggal minutas dan tanggal pengiriman berkas yang waktunya tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Berikut rincian jumlah salinan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu.

Gambar 10. . Capaian Sasaran 2-Indikator 3 pada Evakip



Tabel 21. Jumlah Salinan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Salinan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju	Jumlah Salinan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju Tepat Waktu	Jumlah Salinan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju Tidak Tepat Waktu	% Realisasi
1	Januari	0	0	0	100%
2	Februari	4	4	0	100%
3	Maret	1	1	0	100%
4	April	2	2	0	100%
5	Mei	1	1	0	100%
6	Juni	4	4	0	100%
7	Juli	3	3	0	100%
8	Agustus	4	4	0	100%
9	September	3	3	0	100%
10	Oktober	4	4	0	100%
11	November	1	1	0	100%
12	Desember	6	6	0	100%
Jumlah		33	33	0	100%

Capaian kinerja persentase salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 adalah sebesar 100%, 100%, 95,8%, 100% dan 100%. Pada Tahun 2022 capaian kinerja sama dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau mampu mempertahankan kinerja tahun sebelumnya dengan capaian 100%.

Grafik 7. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2018 - 2022



Tabel 22. Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Th. 2018 -2022

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara Pidana	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepengadilan Pengaju Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Pidana Khusus Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	2022	33	33	100%	100%	100%
	2021	38	38	100%	100%	100%
	2020	24	23	100%	95,8%	95,8%
	2019	25	25	100%	100%	100%
	2018	11	11	100%	100%	100%

Pada tahun 2022, capaian kinerja indikator pengiriman Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu baik untuk perkara Perdata, Pidana, dan Pidana Khusus adalah sebesar 100%. Faktor pendukung dalam capaian ini adalah :

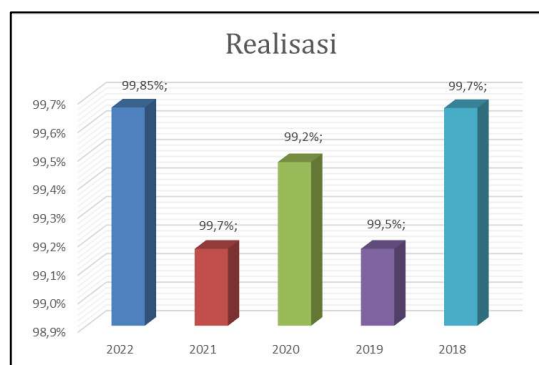
- Pengiriman salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju terlaksana sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, yakni 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan.
- Profesionalisme SDM Pengadilan Tinggi Riau didalam menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pimpinan

Pada tahun 2022, indikator pengiriman Salinan putusan ke Pengadilan Pengaju secara tepat waktu baik untuk perkara Perdata, Pidana, dan Pidana Khusus adalah sebesar 100%. ini menunjukkan terwujudnya efektifitas Pengadilan Tinggi Riau dalam mengirim salinan putusan perkara pidana khusus ke Pengadilan Pengaju.

REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022, Pengadilan Tinggi mendapatkan Pagu anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 24.512.067.000,00 (Dua puluh empat miliar lima ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah). Realisasi Anggaran pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 sebesar 99,7%, 99,5%, 99,2%, 99,7% dan 99,85%. ini menunjukkan bahwa disetiap tahun Pengadilan Tinggi Riau dapat melaksanakan anggaran secara optimal dan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Grafik 8. Realisasi Anggaran Tahun 2018 - 2022



Tabel 23 Realisasi Anggaran Tahun 2018 - 2022

No	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	2022	Rp 24.512.067.000	Rp 24.476.206.678	99,85%	Rp 35.8690.332	0,15%
2.	2021	Rp 24.360.296.000	Rp 24.278.241.068	99,7%	Rp 82.054.932	0,3%
3.	2020	Rp 22.261.062.000	Rp 22.076.214.241	99,2%	Rp 184.847.759	0,8%
4.	2019	Rp 24.097.263.000	Rp 23.970.405.115	99,5%	Rp 126.857.885	0,5%
5.	2018	Rp 25.057.723.000	Rp 24.973.783.582	99,7%	Rp 83.939.418	0,3%

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Riau alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 24.512.067.000,00 (Dua puluh empat miliar lima ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah), dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp. 428.790.000,- (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi : Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 24.512.067.000,- (Dua puluh empat miliar lima ratus dua belas juta enam puluh tujuh ribu rupiah), yang meliputi :

1. Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 18.964.480.000,- (Delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.

2. Belanja Barang

Jumlah Belanja Barang tahun 2022 sebesar Rp. 5.094.087.000,- (lima milyar sembilan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu rupiah). Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan.

3. Belanja Modal

Jumlah Belanja Modal tahun 2021 2022 sebesar Rp. 453.498.600,- (empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Tabel 24. Realisasi DIPA 01

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 18.964.480.000	Rp 18.929.044.821	99,81%	Rp 35.435.179	0,19%
2.	Belanja Barang	Rp 5.094.087.000	Rp 5.093.663.257	99,99%	Rp 423.743	0,01%
3.	Belanja Modal	Rp 453.500.000	Rp 453.498.600	100,00%	Rp 1.400	0,00%
	Jumlah	Rp 24.512.067.000	Rp 24.476.206.678	99,85%	Rp 35.860.322	0,15%

DIPA (03) Badan Peradilan Umum : Anggaran DIPA (03) sebesar Rp. 428.790.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang meliputi: belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk

menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan. Berdasarkan tabel dibawah ini pada tahun 2022 penyerapan Realisasi DIPA 03 adalah sebesar 99,86% yang digunakan untuk efektifitas penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Riau.

Tabel 25. Realisasi DIPA 03

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1.	Belanja Barang	Rp 428.790.000	Rp 428.180.094	99,86%	Rp 609.906	0,14%
	Jumlah	Rp 428.790.000	Rp 428.180.094	99,86%	Rp 609.906	0,14%

DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (03) Pengadilan Tinggi Riau digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Dukungan Manajemen

1.1. Kegiatan :

Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut :

- a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

- b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- e. Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 24.512.067.000,00 dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 26. Realisasi DIPA 01 mendukung Sasaran 1 dan 7 Indikator

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 18.964.480.000	Rp 18.929.044.821	99,6%
2	Belanja Barang Operasional	Rp 976.614.000	Rp 976.597.936	99,9%
3	Belanja Non Operasional	Rp 65.321.000	Rp 65.320.000	100,0%
4	Belanja Barang Persediaan	Rp 120.800.000	Rp 120.797.704	100,0%
5	Belanja Jasa	Rp 1.852.786.000	Rp 1.897.457.015	100,0%
6	Belanja Pemeliharaan	Rp 895.562.000	Rp 1.343.742.563	100,0%
7	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 580.287.000	Rp 717.711.155	98,9%
Jumlah		Rp 24.512.067.000	Rp 24.476.206.678	99,85%

1.2 Kegiatan :

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI. kegiatan ini untuk mendukung tercapainya:

Indikator Sasaran Strategis 1 yaitu: Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 453.500.000,00 dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 27. Realisasi DIPA 01 Mendukung Indikator Sasaran 1

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi			
		Rp.		%	
Belanja Modal					
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp	293.500.000	Rp	293.500.000	100%
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Rp	160.000.000	Rp	159.998.600	100%
Jumlah	Rp	453.500.000	Rp	453.498.600	100%

2. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 2 yaitu:

- a. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

- b. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (03) BADILUM sebesar Rp. 428.790.000,- dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 28 Biaya Proses Tahun 2021 Mendukung Sasaran Strategis 2

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Barang Operasional	Rp 100.718.000	Rp 100.715.255	99,9%
2	Belanja Barang Persediaan	Rp 128.445.000	Rp 128.444.038	99,9%
3	Belanja Non Operasional	Rp 1.550.000	Rp 1.550.000	99,9%
4	Belanja Jasa	Rp 5.900.000	Rp 5.297.000	89,7%
5	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 192.177.000	Rp 192.175.347	99,8%
Jumlah		Rp 428.790.000	Rp 428.180.094	99,86%

Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Untuk pengiriman salinan putusan Perdata menggunakan biaya Proses

dari bagian kepaniteraan Perdata. Berikut rincian biaya proses tahun 2022.

Tabel 29. Realisasi DIPA 03 Mendukung Sasaran Strategis 2

No.	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	646.000	2.700.000	2.600.000	746.000	0	746.000
2	Februari	Biaya Perkara	746.000	3.300.000	3.420.000	626.000	0	626.000
3	Maret	Biaya Perkara	626.000	3.300.000	3.652.000	626.000	0	626.000
4	April	Biaya Perkara	486.000	3.300.000	3.200.000	586.000	0	586.000
5	Mei	Biaya Perkara	568.000	2.100.000	2.142.000	526.000	0	526.000
6	Juni	Biaya Perkara	526.000	2.550.000	2.650.000	426.000	0	426.000
7	Juli	Biaya Perkara	426.000	4.500.000	4.320.000	606.000	0	606.000
8	Agustus	Biaya Perkara	606.000	2.400.000	2.560.000	446.000	0	446.000
9	September	Biaya Perkara	446.000	2.400.000	2.520.000	326.000	0	326.000
10	Oktober	Biaya Perkara	326.000	3.150.000	3.427.400	486.000	0	486.000
11	November	Biaya Perkara	486.000	5.250.000	4.552.600	746.000	0	746.000
12	Desember	Biaya Perkara	746.000	2.250.000	2.570.000	426.000	0	426.000

Tabel berikut ini menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran Pengadilan Tinggi Riau TA. 2022 sesuai program dan kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Riau tahun 2022.

Tabel 30. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 1 dan Sasaran Startegis 2

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Program : Dukungan Manajemen	DIPA (01) Badan Urusan	24.512.067.000	1. Belanja Pegawai	18.964.480.000	18.929.044.821	99,81%
		2. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Administrasi MARI		2. Belanja Barang Operasional			
		3. Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Badan Urusan Administrasi						
		4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi							
		5 Index Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi MARI		3 Belanja Modal			
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	428.790.000	Belanja Barang Operasional	428.790.000	428.180.094	99,86%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum						
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu							



BAB IV PENUTUP

- KESIMPULAN
- REKOMENDASI

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2022 menyajikan pencapaian 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 5 indikator pada Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 3 indikator pada Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 101%. Dari 8 (delapan) indikator kinerja yang diperjanjikan, semua indikator kinerja dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh capaian kinerja diatas 100%, yaitu capaian Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebesar 103%, dan capaian Sasaran 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara sebesar 101%. Capaian kedua sasaran

tersebut meningkat dari tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain: adanya kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, dan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 24.476.206.678 (Dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 99,85%, dan anggaran dari DIPA (03) Badan Peradilan Umum sebesar Rp.428.180.094 (Empat ratus dua puluh delapan juta serratus delapan puluh ribu sembilan puluh empat rupiah) atau 99.86%.

REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

- ☑ Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparat peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan

- ☑ Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara
- ☑ Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- ☑ Penguatan pengawasan internal dan eksternal
- ☑ Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat
- ☑ Peningkatan sarana, prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

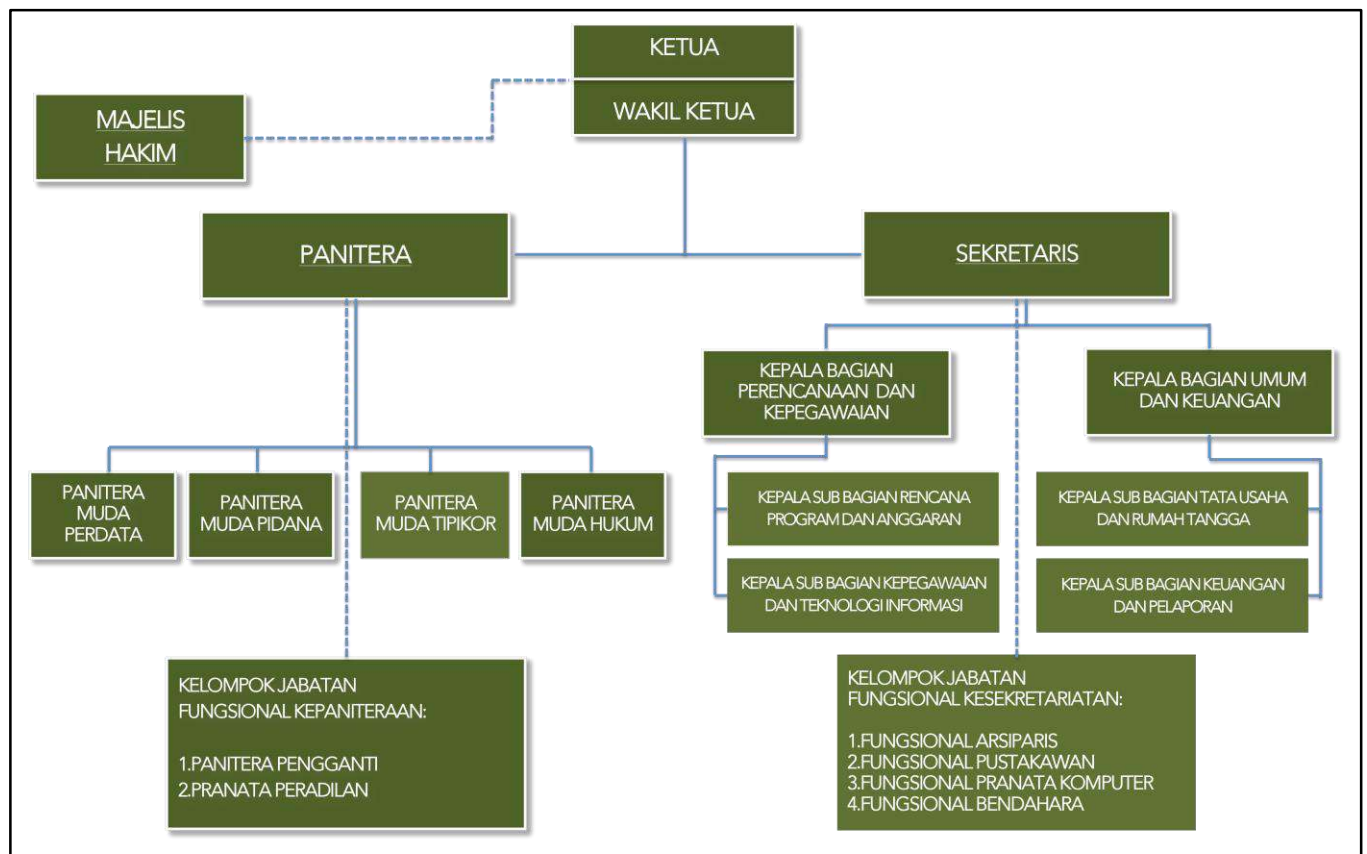
LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- 1. LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI**
- 2. LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- 3. LAMPIRAN 3 : MATRIK RENSTRA 2020 -2024**
- 4. LAMPIRAN 4 : RENCANA KINERJA TAHUN 2022**
- 5. LAMPIRAN 5 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**
- 6. LAMPIRAN 6 : CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022**
- 7. LAMPIRAN 7 : CAPAIAN KINERJA BERKALA**
- 8. LAMPIRAN 8 : CHECKLIST REVIU**
- 9. LAMPIRAN 9 : SK PENYUSUN LkjIP**
- 10. LAMPIRAN 10: ANALISIS EFISIENSI**

LAMPIRAN 1 :
STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI RIAU

(Perma No.7 Tahun 2015)



LAMPIRAN 2 :
INDIKATOR KINERJA UTAMA

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI RIAU**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

			Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		Laporan Tahunan
		Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu Jumlah Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan 100% Catatan : • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \quad 100\%$ Catatan : • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Index Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index Persepsi Kepuasan Stakeholder Catatan : • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} \quad 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} = 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju}} = 100\%$ Catatan : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengawasan, Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3 :
MATRIK RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2020-2024

TUJUAN			SASARAN								STRATEGIS				
NO	URAIAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	Rp.	
		JANGKA MENENGAH			2020	2021	2022	2023	2024						
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tinggi Riau	93%	Meningkatnya Kepercayaan	1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%	Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional	5 Layanan	120.000.000.000	
		93%	Publik Atas Pelayanan	2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	88%	90%	95%	96%	97%						
		97%	Pengadilan Tinggi Riau	2. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	100%	100%	100%						
		44%		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	51%	52%	37%	40%	40%						
				4. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi											
		93%			87%	88%	95%	96%	97%		Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan Prasarana	5 Layanan	2.000.000.000	
2	Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat banding tepat waktu	1.500 perkara	1.800.000.000	
		100%	penyelesaian perkara	2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		100%		3. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						

LAMPIRAN 4 :
RENCANA KINERJA TAHUN 2022



PENGADILAN TINGGI RIAU
REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022
NO. W4.U/2318 /OT.01.1/4/2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	95%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	95%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Pekanbaru, 28 April 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Riau,


BANUSUNAN HARAHAHAP

LAMPIRAN 5 :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PENGADILAN TINGGI RIAU
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR : W4.U /4729 /OT.01.1/9/2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MOHAMMAD IDROES, S.H, M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H, M.H

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 1 September 2022



Pihak Kedua,

BAMBANG MYANTO



Pihak Pertama,

MOHAMMAD IDROES

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
NOMOR : W4.U / 4729 /OT.01.1/9/2022
PENGADILAN TINGGI RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	95%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	95%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 23.252.254.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 453.500.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 428.790.000

Pekanbaru, 1 September 2022
Ketua,

MOHAMMAD IDROES

LAMPIRAN 6 :
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

PENGADILAN TINGGI RIAU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		2 Persentase perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		3 Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		4 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%	38,37%	104%
		5 Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	95,28%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I					103%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		3 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis II					100%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis I dan Sasaran Strategis II					101%

LAMPIRAN 7 :
PENGUKURAN KINERJA PERIODE
TRIWULANAN

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1 Persentase Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
		2 Persentase Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
		3 Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100%	-	-
		4 Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		5 Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		6 Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		7 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	40%	35%	88%
		8 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	95%	97,20%	102%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1			99%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1 Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2 Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		3 Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses 1 hari setelah putus	95%	100%	105%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2			100%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2			100%



Pekanbaru, 7 April 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H, M.H

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN II
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%	38%	103%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	98,8%	104%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					103%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					102%

Pekanbaru, 7 April 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Dr. Dwi H. Panusunan Harahap, S.H, M.H

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN III
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%	38%	103%
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	99,75%	105%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1				104%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2				100%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2				102%

Pekanbaru, 7 Oktober 2022
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Irwana Mardiana Iaroes

**PENCAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
TAHUN 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%	
		2	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%	
		3	Persentase Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%	38%	103%	
		5	Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95%	95,28%	100%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1					103%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		2	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		3	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%	100%	100%	
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2					100%
		Rata - Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan 2					101%


 Pekanbaru, 5 Januari 2023
 Ketua Pengadilan Tinggi Riau

 Mohammad Idrees

LAMPIRAN 8 :
CHECKLIST REVIU

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check list
I	Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerjaIP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi padabadan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√ √ √ √
II	Mekanisme penyusunan 1. LKjIP disusun oleh unit kerjayang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalamLKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dariunit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKj IP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√ √ √ √

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Target Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan	√
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		11. IKU dan IK telah SMART.	√

LAMPIRAN 9 :
SK TIM PENYUSUN LkjIP TAHUN 2022



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU
NOMOR : W4-U/ 6399 /KP.04.05/12/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI RIAU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Riau tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN.11.2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 0 Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGKAT RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI RIAU**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Ketua Pengadilan Tinggi Riau dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Riau.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret tahun 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan inib dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Riau Tahun anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimanan mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 22 Desember 2022
KETUA PENGADILAN RIAU,



MOHAMMAD IDROES

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI RIAU**

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	H. Mohammad Idroes, S.H, M.Hum
2.	Koordinator Validasi Data	Dr. H. Diah Sulastri Dewi, S.H, M.H
3.	ketua	JON EFFREDDI, S.H, M.H
4.	Sekretaris	Tjatur Wahjoe B.S.P, S.H, M.Hum
5.	Anggota	T. Yudianto Syafei Narim., S.IP, M.M
		Roby Hidayat, S.T
		I.A.N Ratnayani, S.H, M.H
		M. Jamalis, S.H
		Yusnidar, S.H
		Diyah Fajar Sari, S.H, M.H
		Dersima Harahap, S.E
		Muhadi, S.E
		Roma Tua Juwita Sihombing, S.E
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Aswijon, S.H, M.H
		Juni Dwianti, S.Si, M.H
		Indah Muharani, S.T
		Manase Siahaan, S.H, M.H
		Betharia Oktaviani, S.E
		Yudi Oktavianus, S.E



KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,

MOHAMMAD IDROES

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI RIAU**

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Riau.
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	A. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; B. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	A.mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja.
5.	Anggota	Mengukur Kinerja, Menyusun Laporan Kinerja serta Menganalisis Indikator Kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	T'im Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal akurat dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN TINGGI RIAU,



MOHAMMAD IDROES

LAMPIRAN 10 :
ANALISIS EFFISIENSI

**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS 1 :

TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

DATA REALISASI TAHUN 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu						
- Perdata	95%	100%	105%	246	259	105%
Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu						
- Pidana	95%	100%	105%	715	753	105%
Persentase perkara Pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu						
- Pidana Khusus	100%	100%	100%	33	33	100%
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	37%	38%	104%	387	401	104%
Index responden Pengadilan Tk. I yang puas terhadap Layanan Tingkat Banding						
Index responden Pengadilan Tk. I yang puas terhadap Layanan Tingkat Banding	95%	95,28%	100,29%	95	95	100%
Rata-rata capaian kinerja fisik	84%	87%	103%	295	308	103%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	24.512.067.000	24.476.206.678	100%	24.512.067.000	24.476.206.678	99,85%

Kesimpulan

- Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 1 efektif yaitu sebesar 103%.
- Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,85%
- Karena capaian kinerja fisik (103%) > realisasi anggaran (99,85%), maka Sasaran Strategis 1 sudah dicapai secara Efisien.

Pekanbaru, 3 Februari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Riau



Mohammad Idroes

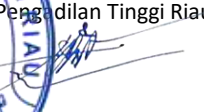
**ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI RIAU TAHUN 2022**

SASARAN STRATEGIS 2
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA
DATA REALISASI TAHUN 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu						
- Perdata	100%	100%	100%	259	259	100,0%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu						
- Pidana	100%	100%	100%	753	753	100,0%
Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu						
- Pidana Khusus	100%	100%	100%	33	33	100%
Rata-rata capaian kinerja fisik	100%	100%	100%	348	348	100%
Rata-rata capaian kinerja keuangan	428.790.000	428.180.094	99,9%	428.790.000	428.180.094	99,9%

KESIMPULAN

Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis 2 efektif yaitu sebesar 100%.
Realisasi Anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,9%
Karena capaian kinerja fisik (100%) > realisasi anggaran (99,9%), maka Sasaran Strategis 2 dicapai secara Efisien.

Pekanbaru, 3 Februari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Riau

Mohammad Idroes

